

Konsentrasi Spasial UMKM di Kota Makassar: Kajian Deskriptif terhadap Distribusi Aktivitas Ekonomi Lokal

^{1*}Imran Tajuddin, ²Andi Muhammad Fara Kessi, ³Muh. Haerdiansyah Syahnur

^{1*,3}Universitas Muslim Indonesia, Makassar

²Universitas Wira Bhakti, Makassar

e-mail korespondensi : imran.tajuddin@umi.ac.id

* Corresponding author

Submitted: 23 Mei 2026

Accepted: 5 Juli 2026

Published: 7 Juli 2026

ABSTRACT

Studies on urban MSMEs have generally focused on economic contribution, business performance, empowerment, and competitiveness, while research that positions MSMEs as an urban spatial phenomenon remains limited. This limitation has left the inter-district distribution of MSMEs, patterns of local economic concentration, and their relationship with accessibility and spatial planning directions insufficiently examined empirically. This study aims to analyze the spatial concentration of MSMEs in Makassar City and its relevance to more inclusive spatial planning. A descriptive quantitative-spatial approach was employed, with districts used as the unit of analysis. Data on the number of MSMEs by district in 2024 were analyzed through MSME distribution mapping, relative contribution calculation, the construction of an Economic Concentration Index using normalization and scoring, and descriptive-comparative assessment of regional accessibility, public facilities, demographic pressure, and land-use suitability based on RTRW/RDTR documents. The findings show that MSME concentration is not limited to the old city center but also strengthens in districts experiencing residential growth and emerging economic activities, particularly Tamalate, Biringkanaya, Manggala, and Rappocini. These findings indicate that MSME concentration can serve as a basis for developing local economic sub-centers, although it does not automatically reflect equitable economic access across districts.

Keywords: *Inclusive Spatial Planning; Local Economic Activity; MSMEs; Regional Accessibility; Spatial Access Inequality; Spatial Concentration*

PENDAHULUAN

Kota Makassar merupakan salah satu pusat pertumbuhan utama di kawasan timur Indonesia yang mengalami perkembangan aktivitas ekonomi, permukiman, perdagangan, jasa, pendidikan, pemerintahan, dan transportasi secara intensif. Perkembangan tersebut mendorong terbentuknya konsentrasi aktivitas ekonomi pada wilayah-wilayah tertentu, terutama kecamatan yang memiliki aksesibilitas tinggi, kedekatan dengan jaringan jalan utama, pusat perdagangan, kawasan jasa, pelabuhan, serta kawasan permukiman yang terus berkembang. Dalam konteks perkotaan, konsentrasi aktivitas ekonomi bukan merupakan gejala yang sepenuhnya negatif karena dapat menciptakan efisiensi aglomerasi, memperluas pasar, meningkatkan produktivitas, serta mempercepat pertukaran barang, jasa, tenaga kerja, dan informasi.

Secara teoretis, aglomerasi ekonomi menjelaskan bahwa aktivitas ekonomi cenderung terkonsentrasi pada lokasi tertentu karena adanya keuntungan kedekatan. Marshall (1890) menekankan bahwa kedekatan antaraktivitas ekonomi dapat menghasilkan manfaat melalui ketersediaan tenaga kerja, spesialisasi, dan pertukaran pengetahuan. Krugman (1991), melalui pendekatan *New Economic Geography*, menjelaskan bahwa konsentrasi ekonomi terbentuk karena interaksi antara skala ekonomi, biaya transportasi, dan akses pasar. Fujita et al. (1999) kemudian memperluas pemahaman tersebut dengan menekankan bahwa aktivitas ekonomi perkotaan tidak hanya terkonsentrasi pada satu titik, tetapi dapat berkembang dalam sistem ruang yang saling terhubung. Dalam konteks Kota Makassar, perspektif ini relevan untuk membaca

mengapa kecamatan tertentu cenderung memiliki jumlah UMKM lebih besar dibandingkan kecamatan lain.

Namun, konsentrasi ekonomi juga perlu dibaca secara hati-hati karena pertumbuhan yang terkumpul pada wilayah tertentu belum tentu menghasilkan pemerataan manfaat pembangunan. Teori pusat pertumbuhan menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi sering kali muncul pada titik atau kawasan tertentu yang memiliki daya dorong ekonomi lebih kuat. Perroux (1955) menyatakan bahwa pertumbuhan tidak berlangsung merata di semua wilayah, melainkan berkembang melalui pusat-pusat pertumbuhan. Myrdal (1957) membedakan dampak pusat pertumbuhan menjadi *spread effect* dan *backwash effect*. *Spread effect* terjadi ketika pertumbuhan di pusat ekonomi mampu mendorong perkembangan wilayah sekitarnya, sedangkan *backwash effect* terjadi ketika pusat ekonomi justru menarik modal, tenaga kerja, investasi, dan infrastruktur dari wilayah lain. Hirschman (1958) juga menegaskan bahwa penyebaran manfaat dari pusat pertumbuhan tidak berlangsung otomatis, melainkan membutuhkan dukungan kebijakan, konektivitas, dan kelembagaan.

Pada konteks tata ruang, persoalan utama bukan terletak pada ada atau tidaknya konsentrasi ekonomi, tetapi pada bagaimana konsentrasi tersebut dikelola agar tidak memperlebar kesenjangan akses antarwilayah. Tata ruang berperan sebagai instrumen untuk mengarahkan distribusi pusat kegiatan, jaringan transportasi, kawasan permukiman, fasilitas publik, serta pusat-pusat pelayanan ekonomi. Jika pertumbuhan ekonomi hanya mengikuti pola investasi yang terkonsentrasi pada wilayah yang sudah berkembang, maka pembangunan kota berpotensi semakin bias ke kawasan tertentu. Sebaliknya, apabila tata ruang mampu mengembangkan pusat-pusat kegiatan baru yang terhubung dengan wilayah lain, maka manfaat pertumbuhan ekonomi dapat didistribusikan secara lebih luas.

Kajian-kajian terdahulu menunjukkan bahwa konsentrasi aktivitas ekonomi memiliki hubungan erat dengan aksesibilitas dan distribusi manfaat pembangunan. Lan et al. (2026) menunjukkan bahwa aglomerasi fintech di kota-kota China mampu meningkatkan peluang pasar tenaga kerja, tetapi manfaatnya cenderung lebih banyak dinikmati oleh wilayah maju dan kelompok pekerja berpendidikan tinggi. X. Yang et al. (2020a), melalui studi di Beijing, menemukan bahwa akses terhadap aktivitas ekonomi cenderung menurun dari pusat kota menuju wilayah perifer, sehingga penduduk pinggiran menghadapi hambatan lebih besar dalam menjangkau peluang ekonomi. Xu et al. (2021) menjelaskan bahwa diferensiasi regional perkotaan berkaitan dengan penggunaan lahan dan karakter geografis yang membentuk pola pembangunan tidak merata. Ouassou dan Idrissi (2025) juga menegaskan bahwa struktur inti-pinggiran dapat memperkuat ketimpangan spasial apabila tidak dikoreksi melalui kebijakan spasial yang tepat.

Pada perkembangan kota yang semakin meluas, pola pertumbuhan fisik tidak selalu identik dengan pemerataan ekonomi. Tripathi dan Yenneti (2024) menunjukkan bahwa distribusi populasi perkotaan yang tidak seimbang dapat berkaitan dengan ketimpangan pendapatan. Guillain dan Le Gallo (2010) menemukan bahwa kepadatan pekerjaan dalam wilayah metropolitan dapat tetap terkonsentrasi pada titik-titik tertentu meskipun wilayah kota terus berkembang. Wu (2010) juga menegaskan bahwa perbedaan antara wilayah urban dan suburban dapat memperkuat disparitas ketika kawasan pinggiran tidak memiliki akses memadai terhadap pekerjaan berkualitas dan infrastruktur pendukung. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa perluasan wilayah perkotaan perlu dibaca bersama dengan distribusi pusat kegiatan, akses transportasi, dan layanan dasar.

Dalam kajian pemasaran, keputusan dan perilaku ekonomi konsumen juga dipengaruhi oleh referensi lingkungan serta stimulus eksternal yang membentuk preferensi pasar (Syahnur & Bahari, 2023). Sementara itu, perkembangan adopsi teknologi selama satu dekade menunjukkan bahwa transformasi digital berperan dalam memperluas akses pasar dan memperkuat kemampuan pelaku usaha untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan ekonomi (Syahnur et al., 2025). Dua perspektif tersebut memperkuat alasan bahwa distribusi UMKM tidak cukup dibaca dari jumlah unit usaha, tetapi perlu dikaitkan dengan akses pasar, lingkungan permukiman, dan dukungan infrastruktur kota.

Pada konteks Kota Makassar, UMKM menjadi indikator penting untuk membaca distribusi aktivitas ekonomi lokal karena keberadaannya tersebar pada berbagai kecamatan dan memiliki

keterkaitan langsung dengan akses pasar, kepadatan penduduk, permukiman, serta aktivitas perdagangan dan jasa. Data jumlah UMKM per kecamatan tahun 2024 menunjukkan adanya perbedaan distribusi UMKM antarwilayah. Kecamatan Tamalate mencatat jumlah UMKM tertinggi, yaitu 4.533 unit, diikuti Biringkanaya sebanyak 4.120 unit, Manggala sebanyak 3.962 unit, dan Rappocini sebanyak 3.012 unit. Sementara itu, kecamatan seperti Kepulauan Sangkarrang, Ujung Pandang, Wajo, dan Ujung Tanah memiliki jumlah UMKM yang relatif lebih rendah. Perbedaan ini menjadi indikasi awal bahwa distribusi UMKM di Kota Makassar tidak tersebar secara merata antar kecamatan. Namun, perbedaan jumlah UMKM tersebut belum dapat langsung disimpulkan sebagai ketimpangan spasial tanpa membandingkannya dengan indikator lain seperti aksesibilitas, fasilitas publik, tekanan demografis, dan kesesuaian pemanfaatan ruang.

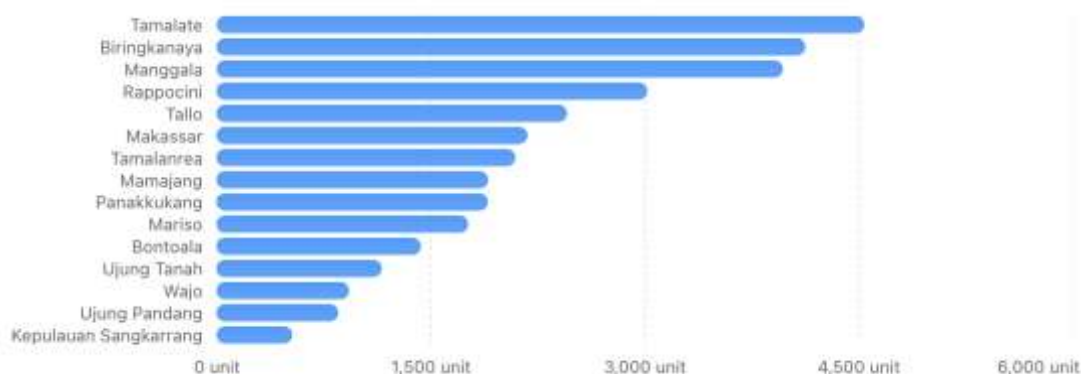


Figure 1 Konsentrasi Aktivitas Ekonomi Berbasis Jumlah UMKM per Kecamatan di Kota Makassar Tahun 2024

Setelah jumlah UMKM digunakan sebagai indikator awal konsentrasi ekonomi lokal, analisis perlu dilanjutkan dengan melihat keterhubungannya dengan faktor spasial lain. Suatu kecamatan dapat memiliki jumlah UMKM tinggi, tetapi belum tentu mencerminkan pusat pertumbuhan yang inklusif apabila tidak didukung oleh transportasi yang memadai, fasilitas publik yang seimbang, dan kesesuaian dengan arahan tata ruang. Sebaliknya, wilayah dengan jumlah UMKM relatif rendah tidak selalu berarti tidak potensial, karena dapat saja memiliki akses transportasi, fasilitas publik, atau posisi strategis yang memungkinkan pengembangan sub-pusat ekonomi pada masa depan. Oleh karena itu, penelitian ini menempatkan konsentrasi UMKM sebagai pintu masuk untuk membaca potensi pembentukan pusat pertumbuhan lokal, bukan sebagai satu-satunya dasar untuk menyimpulkan kondisi ketimpangan wilayah.

Kebutuhan terhadap tata ruang yang lebih inklusif juga berkaitan dengan konsep keadilan spasial. Lefebvre (1968) melalui gagasan *right to the city* menekankan bahwa warga memiliki hak untuk mengakses dan membentuk ruang kota. Harvey (2008) memperluas gagasan tersebut dengan menempatkan kota sebagai arena distribusi keadilan sosial-ekonomi. Soja (2010) menegaskan bahwa keadilan tidak hanya berkaitan dengan pendapatan, tetapi juga dengan bagaimana sumber daya, fasilitas, dan peluang didistribusikan dalam ruang. UN-Habitat (2020) juga menekankan bahwa kota inklusif harus menjamin akses yang setara terhadap layanan dasar, transportasi, ruang publik, hunian layak, dan kesempatan ekonomi. Dalam penelitian ini, konsep kota inklusif dan keadilan spasial digunakan secara terbatas untuk meninjau apakah konsentrasi UMKM dapat menjadi dasar pengembangan pusat pertumbuhan yang lebih terhubung dan lebih merata secara akses.

Konektivitas transportasi menjadi salah satu elemen penting dalam membaca hubungan antara konsentrasi UMKM dan inklusivitas wilayah. Konsentrasi ekonomi dapat memberikan manfaat lebih luas apabila masyarakat dari berbagai kecamatan memiliki akses yang baik ke pusat pekerjaan, pendidikan, kesehatan, dan layanan ekonomi. Barbosa et al. (2024) menunjukkan bahwa struktur pertumbuhan kota yang tidak memperhatikan keadilan spasial dapat memperburuk ketimpangan, terutama pada wilayah pinggiran yang mengalami *urban sprawl*. Arvin et al. (2025) juga menunjukkan bahwa bentuk kota yang lebih kompak cenderung berkaitan dengan tingkat ketimpangan sosial dan spasial yang lebih rendah dibandingkan pola urbanisasi yang menyebar tanpa kendali. Dalam konteks Makassar, hal ini menunjukkan pentingnya membaca konsentrasi

UMKM bersama dengan akses transportasi dan pola pemanfaatan ruang agar analisis tidak berhenti pada jumlah unit usaha semata.

Selain transportasi, ketersediaan layanan dasar dan fasilitas publik juga penting dalam menilai potensi pusat pertumbuhan yang inklusif. Yin et al. (2018) menunjukkan bahwa ketimpangan akses terhadap fasilitas kesehatan berkaitan erat dengan distribusi spasial fasilitas dan kemampuan masyarakat menjangkaunya. Liao et al. (2025) menekankan bahwa integrasi sosial penduduk dalam komunitas perkotaan dipengaruhi oleh kondisi kelembagaan lokal dan jalur sosial yang beragam. Dengan demikian, pengembangan pusat pertumbuhan lokal tidak hanya berkaitan dengan banyaknya aktivitas ekonomi, tetapi juga dengan kemampuan wilayah menyediakan layanan publik, ruang usaha, dan konektivitas yang memungkinkan masyarakat memperoleh manfaat dari pertumbuhan tersebut.

Pemanfaatan data spasial menjadi penting untuk membaca hubungan antara distribusi UMKM, aksesibilitas, fasilitas publik, tekanan demografis, dan arahan tata ruang. Y. Yang & Yan (2025) menunjukkan bahwa pendekatan berbasis jaringan dan data spasial dapat digunakan untuk membaca pola distribusi aktivitas ekonomi perkotaan secara lebih akurat. Dalam penelitian ini, data jumlah UMKM per kecamatan digunakan sebagai indikator awal konsentrasi ekonomi lokal, kemudian dibandingkan secara deskriptif dengan indikator aksesibilitas wilayah, fasilitas publik, kepadatan penduduk, dan kesesuaian pemanfaatan ruang. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini tidak dimaksudkan untuk membuktikan ketimpangan spasial secara kausal, melainkan untuk mengidentifikasi pola konsentrasi UMKM dan meninjau relevansinya bagi perencanaan tata ruang yang lebih inklusif.

Table 1 Klasifikasi Wilayah Perkotaan Berdasarkan Konsentrasi UMKM, Aksesibilitas, Fasilitas Publik, Kepadatan Penduduk, dan Kesesuaian Tata Ruang

Kategori Wilayah	UMKM	Transportasi	Fasilitas Publik	Kepadatan Penduduk	Kesesuaian Tata Ruang	Makna
Pusat ekonomi kuat	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi/sedang	Sesuai	pusat pertumbuhan eksisting
Sub-pusat potensial	Sedang/rendah	Tinggi	Sedang/tinggi	Sedang/tinggi	Sesuai	layak dikembangkan
Wilayah tumbuh tidak seimbang	Tinggi	Rendah	Rendah	Tinggi	Kurang sesuai	ekonomi tumbuh tetapi belum inklusif
Wilayah tertinggal spasial	Rendah	Rendah	Rendah	Tinggi/rendah	Tidak prioritas	butuh intervensi tata ruang
Wilayah konflik tata ruang	Tinggi	Sedang	Sedang	Tinggi	Tidak sesuai	perlu pengendalian pemanfaatan ruang

Research Gap

Berdasarkan kajian sebelumnya, terdapat beberapa celah penelitian yang menjadi dasar penting bagi studi ini. Pertama, penelitian mengenai UMKM umumnya masih berfokus pada kontribusi ekonomi, kinerja usaha, pemberdayaan, daya saing, digitalisasi, dan penguatan kapasitas pelaku usaha. Kajian yang menempatkan UMKM sebagai fenomena spasial perkotaan, khususnya untuk membaca distribusi antar kecamatan dan potensi konsentrasi ekonomi lokal, masih relatif terbatas. Akibatnya, UMKM sering dipahami sebagai unit ekonomi, tetapi belum banyak dianalisis sebagai bagian dari struktur ruang kota.

Kedua, kajian tentang konsentrasi ekonomi dan ketimpangan spasial lebih banyak menggunakan indikator makro seperti pendapatan wilayah, kepadatan pekerjaan, penggunaan lahan, akses transportasi, dan distribusi fasilitas publik. Sementara itu, penggunaan jumlah UMKM sebagai indikator awal untuk membaca konsentrasi aktivitas ekonomi lokal pada skala kecamatan belum banyak dikembangkan, khususnya dalam konteks Kota Makassar. Padahal, UMKM merupakan salah satu bentuk aktivitas ekonomi yang paling dekat dengan dinamika permukiman, akses pasar, dan kebutuhan layanan perkotaan.

Ketiga, kajian tata ruang perkotaan sering membahas pusat pertumbuhan, aksesibilitas, dan keadilan spasial secara konseptual, tetapi belum banyak yang menghubungkannya dengan distribusi UMKM sebagai basis ekonomi lokal. Dengan demikian, masih terdapat ruang untuk menelaah bagaimana konsentrasi UMKM dapat digunakan sebagai dasar awal dalam

mengidentifikasi pusat ekonomi eksisting, sub-pusat potensial, wilayah tumbuh tidak seimbang, serta wilayah yang membutuhkan intervensi tata ruang.

Keempat, dalam konteks Kota Makassar, studi yang mengintegrasikan data jumlah UMKM per kecamatan dengan pembacaan aksesibilitas, fasilitas publik, tekanan demografis, dan kesesuaian pemanfaatan ruang masih terbatas. Keterbatasan ini penting karena pembangunan kota tidak cukup hanya dipahami melalui pertumbuhan ekonomi agregat, tetapi juga perlu dilihat dari bagaimana aktivitas ekonomi lokal tersebar dan terhubung dengan struktur ruang kota.

Berdasarkan gap tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsentrasi spasial UMKM di Kota Makassar dan meninjau relevansinya bagi perencanaan tata ruang yang lebih inklusif. Secara khusus, penelitian ini memetakan distribusi UMKM per kecamatan, menghitung kontribusi relatif dan Indeks Konsentrasi Ekonomi, serta membaca secara deskriptif hubungan antara konsentrasi UMKM dengan aksesibilitas wilayah, fasilitas publik, tekanan demografis, dan kesesuaian pemanfaatan ruang. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan dasar empiris awal bagi pengembangan sub-pusat ekonomi lokal dan perencanaan tata ruang yang lebih memperhatikan pemerataan akses antarwilayah.

STUDI LITERATUR

Sintesis Teori Aglomerasi, Pusat Pertumbuhan, dan Keadilan Spasial

Penelitian ini menggunakan tiga landasan konseptual utama, yaitu teori aglomerasi ekonomi, teori pusat pertumbuhan, serta konsep kota inklusif dan keadilan spasial. Ketiga konsep tersebut tidak diposisikan secara terpisah, tetapi saling berhubungan dalam menjelaskan bagaimana konsentrasi UMKM terbentuk, bagaimana konsentrasi tersebut dapat berkembang menjadi pusat pertumbuhan lokal, serta bagaimana tata ruang dapat digunakan untuk menilai potensi pemerataan akses antarwilayah.

Teori aglomerasi ekonomi menjelaskan bahwa aktivitas ekonomi cenderung terkonsentrasi pada lokasi tertentu karena adanya keuntungan kedekatan. Marshall (1890) menekankan bahwa konsentrasi aktivitas ekonomi dapat menciptakan manfaat melalui ketersediaan tenaga kerja, spesialisasi, dan pertukaran pengetahuan. Krugman (1991), melalui pendekatan *New Economic Geography*, menjelaskan bahwa aglomerasi terbentuk melalui interaksi antara skala ekonomi, biaya transportasi, dan akses pasar. Wilayah yang memiliki akses lebih baik terhadap pasar, tenaga kerja, jaringan transportasi, dan infrastruktur cenderung menarik lebih banyak aktivitas ekonomi dibandingkan wilayah yang aksesnya lebih terbatas. Fujita et al. (1999) memperluas pemahaman tersebut dengan menekankan bahwa aktivitas ekonomi tidak hanya berkembang dalam satu pusat utama, tetapi dapat terbentuk dalam jaringan ruang yang saling terhubung.

Teori aglomerasi dalam konteks Kota Makassar, digunakan untuk menjelaskan mengapa jumlah UMKM cenderung lebih besar pada kecamatan tertentu. Kecamatan dengan akses pasar yang lebih luas, perkembangan permukiman yang pesat, kedekatan dengan koridor perdagangan, serta dukungan infrastruktur yang lebih baik berpeluang memiliki konsentrasi UMKM lebih tinggi. Namun, aglomerasi tidak dapat langsung dipahami sebagai indikator keberhasilan pembangunan wilayah. Konsentrasi UMKM memang dapat menunjukkan dinamika ekonomi lokal, tetapi belum otomatis menunjukkan pemerataan manfaat ekonomi. Oleh karena itu, aglomerasi perlu dianalisis lebih lanjut melalui keterkaitannya dengan aksesibilitas wilayah, fasilitas publik, tekanan demografis, dan kesesuaian tata ruang.

Teori pusat pertumbuhan melengkapi teori aglomerasi dengan menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak terjadi secara merata di seluruh wilayah. Perroux (1955) menyatakan bahwa pertumbuhan biasanya muncul pada titik atau kawasan tertentu yang memiliki daya dorong ekonomi lebih kuat. Myrdal (1957) menjelaskan bahwa pusat pertumbuhan dapat menghasilkan dua kemungkinan dampak, yaitu *spread effect* dan *backwash effect*. *Spread effect* terjadi ketika pertumbuhan pada suatu pusat ekonomi mampu mendorong perkembangan wilayah sekitar melalui perluasan pasar, lapangan kerja, akses layanan, dan mobilitas ekonomi. Sebaliknya, *backwash effect* terjadi ketika pusat pertumbuhan justru menarik modal, tenaga kerja, investasi, dan infrastruktur dari wilayah lain sehingga memperbesar ketimpangan antarwilayah. Hirschman (1958) juga menegaskan bahwa penyebaran manfaat pembangunan dari pusat pertumbuhan tidak berlangsung otomatis, melainkan membutuhkan dukungan kebijakan, infrastruktur, konektivitas, dan kelembagaan.

Dalam penelitian ini, teori pusat pertumbuhan digunakan untuk membaca apakah konsentrasi UMKM pada kecamatan tertentu dapat dipahami sebagai pusat ekonomi eksisting atau sebagai sub-pusat ekonomi potensial. Suatu wilayah dengan jumlah UMKM tinggi dapat menjadi pusat pertumbuhan lokal apabila didukung oleh akses transportasi, fasilitas publik, serta kesesuaian dengan arahan tata ruang. Sebaliknya, wilayah dengan jumlah UMKM tinggi tetapi akses transportasi dan fasilitas publiknya lemah dapat menunjukkan gejala pertumbuhan yang belum seimbang. Dengan demikian, teori pusat pertumbuhan membantu menjelaskan bahwa konsentrasi UMKM tidak cukup dinilai dari banyaknya unit usaha, tetapi juga dari kemampuan wilayah tersebut menghubungkan aktivitas ekonomi dengan wilayah lain.

Konsep kota inklusif dan keadilan spasial digunakan untuk memberikan dimensi normatif dan evaluatif terhadap konsentrasi ekonomi. Lefebvre (1968), melalui konsep *right to the city*, menekankan bahwa warga memiliki hak untuk mengakses, menggunakan, dan ikut membentuk ruang kota. Harvey (2008) memperluas gagasan tersebut sebagai tuntutan terhadap keadilan sosial-ekonomi dalam pembangunan perkotaan. Soja (2010) menegaskan bahwa keadilan tidak hanya berkaitan dengan distribusi pendapatan, tetapi juga dengan distribusi ruang, fasilitas, peluang, dan akses terhadap sumber daya kota. UN-Habitat (2020) juga menekankan bahwa kota inklusif harus menjamin akses yang setara terhadap layanan dasar, ruang publik, transportasi, hunian layak, dan kesempatan ekonomi bagi seluruh kelompok masyarakat.

Dalam konteks penelitian ini, konsep kota inklusif dan keadilan spasial digunakan untuk menilai apakah konsentrasi UMKM berpotensi mendukung pemerataan akses ekonomi atau justru menunjukkan kecenderungan konsentrasi manfaat pada wilayah tertentu. Konsentrasi UMKM dapat menjadi dasar pengembangan pusat pertumbuhan lokal, tetapi hanya akan memiliki makna inklusif apabila terhubung dengan transportasi, didukung fasilitas publik, seimbang dengan tekanan demografis, serta sesuai dengan arahan tata ruang. Jika tidak, konsentrasi tersebut berisiko hanya menjadi akumulasi aktivitas ekonomi pada wilayah tertentu tanpa memperluas manfaat bagi wilayah lain.

Hubungan antar teori dalam penelitian ini dapat dijelaskan secara berurutan. Pertama, teori aglomerasi ekonomi menjelaskan terbentuknya konsentrasi UMKM pada kecamatan tertentu. Kedua, teori pusat pertumbuhan menjelaskan kemungkinan konsentrasi tersebut berkembang sebagai pusat ekonomi lokal atau sub-pusat pertumbuhan. Ketiga, konsep kota inklusif dan keadilan spasial digunakan untuk menilai apakah konsentrasi dan pusat pertumbuhan tersebut memiliki potensi mendukung pemerataan akses antarwilayah. Keempat, tata ruang diposisikan sebagai instrumen yang menghubungkan ketiga konsep tersebut melalui pengaturan lokasi pusat kegiatan, jaringan transportasi, fasilitas publik, kawasan perdagangan-jasa, dan arah pengembangan wilayah.

Keterkaitan Konsep Utama Penelitian

Penelitian ini menggunakan lima konsep utama, yaitu konsentrasi spasial UMKM, aksesibilitas wilayah, fasilitas publik, tekanan demografis, dan kesesuaian tata ruang. Konsentrasi spasial UMKM dipahami sebagai pemusatan jumlah UMKM pada kecamatan tertentu. Konsep ini menjadi indikator awal untuk membaca aktivitas ekonomi lokal. Namun, jumlah UMKM tidak diperlakukan sebagai satu-satunya ukuran pusat pertumbuhan, karena wilayah dengan UMKM tinggi belum tentu memiliki akses, layanan, dan dukungan tata ruang yang memadai.

Aksesibilitas wilayah menunjukkan kemampuan suatu kecamatan untuk terhubung dengan pusat kegiatan, jaringan jalan utama, simpul transportasi, pasar, dan wilayah lain. Aksesibilitas menjadi penting karena konsentrasi ekonomi hanya dapat memberikan manfaat yang lebih luas apabila masyarakat dan pelaku usaha dari berbagai wilayah dapat menjangkaunya. X. Yang et al. (2020a) menunjukkan bahwa akses terhadap aktivitas ekonomi dapat menurun dari pusat kota menuju wilayah perifer, sehingga wilayah pinggiran menghadapi hambatan lebih besar dalam menjangkau peluang ekonomi. Dalam konteks ini, aksesibilitas berfungsi sebagai penghubung antara konsentrasi UMKM dan pemerataan manfaat ekonomi.

Fasilitas publik mencerminkan ketersediaan layanan dasar yang mendukung aktivitas ekonomi dan kehidupan masyarakat, seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, pasar, ruang publik, dan layanan perkotaan lainnya. Yin et al. (2018) menunjukkan bahwa ketimpangan akses terhadap fasilitas kesehatan berkaitan dengan distribusi spasial fasilitas dan kemampuan masyarakat

menjangkaunya. Dalam penelitian ini, fasilitas publik diposisikan sebagai faktor pendukung yang menentukan apakah wilayah dengan konsentrasi UMKM dapat berkembang sebagai pusat pertumbuhan yang lebih inklusif.

Tekanan demografis berkaitan dengan kepadatan penduduk dan potensi beban layanan pada suatu wilayah. Wilayah dengan jumlah penduduk tinggi dapat menjadi pasar potensial bagi UMKM, tetapi pada saat yang sama juga dapat menghadapi tekanan terhadap infrastruktur, transportasi, dan layanan dasar. Tripathi dan Yenneti (2024) menunjukkan bahwa distribusi populasi perkotaan yang tidak seimbang dapat berkaitan dengan ketimpangan pendapatan. Oleh karena itu, tekanan demografis perlu dibaca bersama dengan konsentrasi UMKM agar analisis tidak hanya melihat besarnya aktivitas ekonomi, tetapi juga kapasitas wilayah dalam menanggung beban pertumbuhan.

Kesesuaian tata ruang menunjukkan sejauh mana konsentrasi UMKM dan aktivitas ekonomi lokal sejalan dengan arahan struktur ruang, pusat kegiatan, kawasan perdagangan-jasa, jaringan transportasi, dan kebijakan pengembangan wilayah. Tata ruang berfungsi sebagai instrumen untuk mengarahkan konsentrasi ekonomi agar tidak tumbuh secara tidak terkendali. Praja dan Asran (2025) menekankan bahwa tata ruang tidak hanya mengatur zonasi lahan, tetapi juga menentukan bagaimana pusat ekonomi dibentuk, bagaimana wilayah pinggiran dihubungkan, dan bagaimana akses terhadap peluang ekonomi diperluas. Dengan demikian, kesesuaian tata ruang menjadi elemen penting dalam menilai apakah konsentrasi UMKM mendukung arah pembangunan kota yang lebih terencana.

Hubungan antar konsep tersebut membentuk dasar analisis penelitian. Konsentrasi UMKM digunakan untuk mengidentifikasi pusat aktivitas ekonomi lokal. Aksesibilitas, fasilitas publik, dan tekanan demografis digunakan untuk membaca kondisi pendukung atau penghambat pemerataan akses. Kesesuaian tata ruang digunakan untuk menilai apakah pola konsentrasi tersebut sejalan dengan arah perencanaan kota. Kombinasi kelima konsep tersebut kemudian digunakan untuk menyusun tipologi wilayah, seperti pusat ekonomi kuat, sub-pusat potensial, wilayah tumbuh tidak seimbang, wilayah tertinggal secara spasial, dan wilayah konflik tata ruang.

Kerangka Konseptual Penelitian

Berdasarkan sintesis teori dan keterkaitan konsep utama, penelitian ini memosisikan konsentrasi spasial UMKM sebagai titik awal analisis. Konsentrasi UMKM dipahami sebagai gejala aglomerasi ekonomi lokal yang dapat menunjukkan adanya pemusatan aktivitas ekonomi pada kecamatan tertentu. Namun, agar konsentrasi tersebut dapat dipahami secara lebih komprehensif, analisis tidak berhenti pada jumlah UMKM. Konsentrasi UMKM kemudian dibandingkan dengan aksesibilitas wilayah, fasilitas publik, tekanan demografis, dan kesesuaian tata ruang.

Secara konseptual, wilayah dengan konsentrasi UMKM tinggi dan didukung oleh aksesibilitas baik, fasilitas publik memadai, tekanan demografis yang dapat dikelola, serta kesesuaian dengan arahan tata ruang dapat dikategorikan sebagai pusat ekonomi kuat. Wilayah dengan konsentrasi UMKM sedang atau rendah, tetapi memiliki aksesibilitas dan fasilitas publik yang cukup baik serta sesuai dengan arahan tata ruang dapat dipahami sebagai sub-pusat potensial. Sebaliknya, wilayah dengan konsentrasi UMKM tinggi tetapi aksesibilitas dan fasilitas publik rendah dapat menunjukkan pertumbuhan yang belum seimbang. Wilayah dengan konsentrasi UMKM rendah, aksesibilitas rendah, dan fasilitas publik terbatas dapat menunjukkan kebutuhan intervensi tata ruang yang lebih besar.

Kerangka konseptual penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1 Kerangka konsep penelitian ekonomi inklusif

Kerangka tersebut menunjukkan bahwa penelitian ini tidak bertujuan membuktikan hubungan kausal antarvariabel, tetapi menyusun pembacaan deskriptif-spasial mengenai konsentrasi UMKM dan relevansinya terhadap perencanaan tata ruang. Oleh karena itu, kerangka konseptual ini digunakan sebagai dasar untuk mengintegrasikan data jumlah UMKM, kontribusi relatif, Indeks Konsentrasi Ekonomi, aksesibilitas, fasilitas publik, tekanan demografis, dan kesesuaian tata ruang dalam satu analisis tipologi wilayah. Sehingga, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman awal mengenai bagaimana distribusi UMKM di Kota Makassar membentuk pola konsentrasi ekonomi lokal, kecamatan mana yang berpotensi menjadi pusat atau sub-pusat ekonomi, serta wilayah mana yang membutuhkan perhatian lebih dalam perencanaan tata ruang. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan penelitian yang tidak hanya memetakan konsentrasi UMKM, tetapi juga meninjau relevansinya bagi perencanaan tata ruang yang lebih inklusif dan berbasis pemerataan akses antarwilayah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan **kuantitatif deskriptif-spasial** dengan dukungan analisis tata ruang. Pendekatan kuantitatif deskriptif digunakan untuk menggambarkan pola konsentrasi UMKM berdasarkan data numerik pada tingkat kecamatan, sedangkan pendekatan spasial digunakan untuk membaca ketersebaran aktivitas UMKM dalam ruang kota. Fokus utama

penelitian bukan untuk menguji hubungan kausal antarvariabel, melainkan untuk mengidentifikasi pola konsentrasi UMKM dan meninjau keterkaitannya dengan aksesibilitas wilayah, ketersediaan fasilitas publik, tekanan demografis, serta kesesuaian pemanfaatan ruang.

Lokasi penelitian adalah Kota Makassar dengan unit analisis berupa kecamatan. Kecamatan dipilih karena data jumlah UMKM, kependudukan, fasilitas publik, aksesibilitas, dan informasi tata ruang relatif tersedia serta dapat dibandingkan antarwilayah. Setiap kecamatan diperlakukan sebagai satuan spasial untuk membaca variasi konsentrasi UMKM dan potensi perbedaan akses wilayah dalam struktur ruang kota.

Data yang digunakan merupakan data sekunder, baik spasial maupun nonspasial. Data utama penelitian adalah jumlah UMKM per kecamatan tahun 2024. Data pendukung meliputi aksesibilitas wilayah, ketersediaan fasilitas publik, kepadatan penduduk, serta kesesuaian pemanfaatan ruang berdasarkan dokumen RTRW/RDTR Kota Makassar. Analisis tata ruang merujuk pada Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015 tentang RTRW Kota Makassar Tahun 2015–2034 atau dokumen tata ruang terbaru yang berlaku.

Tabel 1 Definisi Operasional Variabel

Variabel/Konsep	Definisi Operasional	Indikator	Interpretasi
Konsentrasi Spasial UMKM	Tingkat pemusatan jumlah UMKM pada kecamatan tertentu di Kota Makassar	Jumlah UMKM per kecamatan, kontribusi relatif terhadap total UMKM kota, dan Indeks Konsentrasi Ekonomi	Semakin tinggi nilai indikator, semakin kuat konsentrasi UMKM pada kecamatan tersebut
Aksesibilitas Wilayah	Kemudahan suatu kecamatan terhubung dengan pusat kegiatan, jaringan jalan utama, dan simpul transportasi	Kedekatan dengan jalan utama, simpul transportasi, dan keterhubungan antarwilayah	Aksesibilitas tinggi menunjukkan wilayah lebih mudah dijangkau dan lebih potensial mendukung aktivitas ekonomi
Fasilitas Publik	Ketersediaan layanan dasar yang mendukung aktivitas ekonomi dan kebutuhan masyarakat	Fasilitas pendidikan, kesehatan, pasar, ruang publik, dan layanan publik lainnya	Fasilitas yang lebih memadai menunjukkan kapasitas wilayah yang lebih baik dalam mendukung pusat pertumbuhan
Tekanan Demografis	Beban wilayah akibat jumlah dan kepadatan penduduk	Kepadatan penduduk dan potensi beban layanan wilayah	Tekanan tinggi dapat menunjukkan pasar potensial, tetapi juga dapat menjadi beban jika tidak didukung layanan memadai
Kesesuaian Tata Ruang	Kesesuaian pola aktivitas UMKM dengan arahan struktur ruang dan zonasi dalam RTRW/RDTR	Kesesuaian dengan pusat kegiatan, kawasan perdagangan-jasa, jaringan jalan, dan kawasan pengembangan	Kesesuaian tinggi menunjukkan aktivitas ekonomi berkembang sejalan dengan arahan perencanaan ruang
Tipologi Wilayah	Klasifikasi kecamatan berdasarkan kombinasi konsentrasi UMKM, aksesibilitas, fasilitas publik, tekanan demografis, dan kesesuaian tata ruang	Gabungan hasil IKE, indikator akses, fasilitas, demografi, dan tata ruang	Menghasilkan kategori pusat ekonomi kuat, sub-pusat potensial, wilayah tumbuh tidak seimbang, wilayah tertinggal, dan wilayah konflik tata ruang

Analisis data dilakukan melalui beberapa tahap. Pertama, data jumlah UMKM per kecamatan ditabulasi untuk mengetahui sebaran UMKM di Kota Makassar. Kedua, kontribusi relatif setiap kecamatan dihitung dengan rumus:

$$\text{Kontribusi}_i = \frac{\text{UMKM}_i}{\text{Total UMKM}} \times 100$$

Ketiga, disusun Indeks Konsentrasi Ekonomi (IKE) untuk menunjukkan tingkat konsentrasi UMKM pada setiap kecamatan. IKE dihitung melalui normalisasi nilai jumlah UMKM menggunakan metode min-max normalization:

$$IKE_i = \frac{X_i - X_{min}}{X_{max} - X_{min}}$$

Keterangan:

IKE_i = Indeks Konsentrasi Ekonomi kecamatan ke-i

X_i = jumlah UMKM pada kecamatan ke-i

X_{min} = jumlah UMKM terendah

X_{max} = jumlah UMKM tertinggi

Tabel 2 Interpretasi nilai IKE, persamaan Malczewski digunakan sebagai dasar analisis spasial/multikriteria

Nilai IKE	Kategori	Makna
0,00–0,33	Rendah	Konsentrasi UMKM lemah
0,34–0,66	Sedang	Konsentrasi UMKM menengah
0,67–1,00	Tinggi	Konsentrasi UMKM kuat

Keempat, hasil IKE dibandingkan dengan indikator aksesibilitas, fasilitas publik, tekanan demografis, dan kesesuaian tata ruang. Perbandingan ini digunakan untuk menilai apakah kecamatan dengan konsentrasi UMKM tinggi juga didukung oleh akses dan layanan wilayah yang memadai.

Kelima, dilakukan klasifikasi wilayah berdasarkan kombinasi konsentrasi UMKM dan indikator pendukung. Klasifikasi ini digunakan untuk mengidentifikasi pusat ekonomi kuat, sub-pusat potensial, wilayah tumbuh tidak seimbang, wilayah tertinggal akses, dan wilayah konflik tata ruang.

Tabel 3 Klasifikasi Wilayah

Kategori Wilayah	Kriteria Utama	Makna
Pusat ekonomi kuat	UMKM tinggi, akses baik, fasilitas memadai, sesuai tata ruang	Wilayah sudah berkembang sebagai pusat ekonomi
Sub-pusat potensial	UMKM sedang/rendah, tetapi akses dan tata ruang mendukung	Wilayah layak dikembangkan
Wilayah tumbuh tidak seimbang	UMKM tinggi, tetapi akses/fasilitas belum memadai	Ekonomi tumbuh, tetapi belum inklusif
Wilayah tertinggal akses	UMKM rendah, akses dan fasilitas terbatas	Perlu intervensi tata ruang dan layanan
Wilayah konflik tata ruang	UMKM tinggi, tetapi tidak sesuai arahan tata ruang	Perlu pengendalian pemanfaatan ruang

Sehingga berdasar dari tahapan tersebut, penelitian ini akan memberikan gambaran mengenai konsentrasi UMKM di Kota Makassar dan indikasi awal ketimpangan akses wilayah. Hasil analisis digunakan sebagai dasar untuk menilai relevansi penguatan sub-pusat ekonomi, peningkatan konektivitas, dan pemerataan layanan dasar dalam perencanaan tata ruang yang lebih inklusif.

HASIL PENELITIAN

Bagian ini menyajikan hasil analisis kuantitatif deskriptif-spasial mengenai konsentrasi UMKM di Kota Makassar. Analisis dilakukan melalui lima tahap, yaitu pemetaan distribusi UMKM per kecamatan, perhitungan kontribusi relatif setiap kecamatan, penyusunan Indeks Konsentrasi Ekonomi (IKE), pembacaan indikator pendukung berupa aksesibilitas wilayah, fasilitas publik, tekanan demografis, dan kesesuaian tata ruang, serta penyusunan tipologi wilayah. Hasil penelitian tidak dimaksudkan untuk membuktikan ketimpangan spasial secara

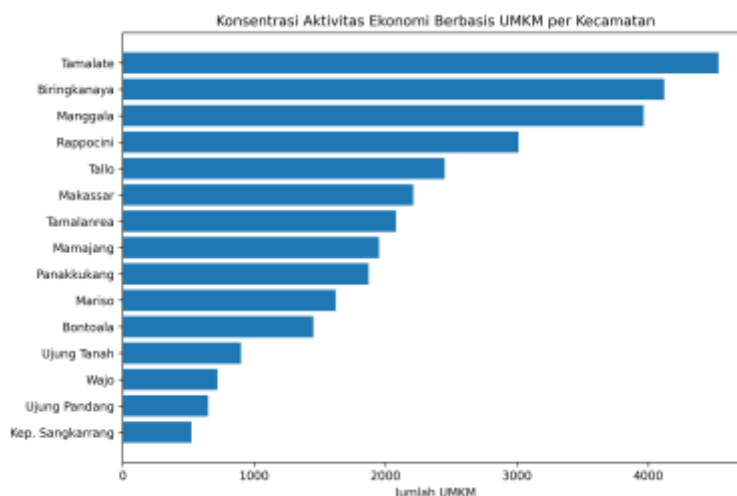
kausal, tetapi untuk menunjukkan pola konsentrasi UMKM dan indikasi awal ketimpangan akses wilayah.

Distribusi UMKM dan Kontribusi Relatif per Kecamatan

Hasil tabulasi data menunjukkan bahwa distribusi UMKM di Kota Makassar tidak tersebar secara merata antar kecamatan. Dari total 32.049 UMKM yang dianalisis, konsentrasi terbesar berada pada Kecamatan Tamalate, Biringkanaya, Manggala, dan Rappocini. Tamalate memiliki jumlah UMKM tertinggi, yaitu 4.533 unit atau 14,14% dari total UMKM Kota Makassar. Kecamatan berikutnya adalah Biringkanaya dengan 4.120 unit atau 12,86%, Manggala dengan 3.962 unit atau 12,36%, dan Rappocini dengan 3.012 unit atau 9,40%.

Tabel 4 Distribusi Jumlah UMKM dan Kontribusi terhadap Total UMKM Kota Makassar

Kecamatan	Jumlah UMKM	Kontribusi (%)	Kumulatif (%)
Tamalate	4.533	14,14	14,14
Biringkanaya	4.120	12,86	27
Manggala	3.962	12,36	39,36
Rappocini	3.012	9,4	48,76
Tallo	2.450	7,64	56,4
Makassar	2.210	6,9	63,3
Tamalanrea	2.080	6,49	69,79
Mamajang	1.950	6,08	75,87
Panakkukang	1.870	5,83	81,71
Mariso	1.620	5,05	86,76
Bontoala	1.450	4,52	91,29
Ujung Tanah	900	2,81	94,1
Wajo	720	2,25	96,34
Ujung Pandang	650	2,03	98,37
Kep. Sangkarrang	522	1,63	100



Gambar 2 Konsentrasi Aktivitas Ekonomi Berbasis Jumlah UMKM per Kecamatan di Kota Makassar

Temuan utama dari tahap ini adalah bahwa jumlah UMKM tinggi tidak selalu identik dengan pusat kota administratif. Beberapa kecamatan dengan perkembangan permukiman dan aktivitas ekonomi baru justru memiliki jumlah UMKM lebih besar dibandingkan kecamatan pusat kota lama. Oleh karena itu, konsentrasi UMKM perlu dibaca sebagai indikator awal aktivitas ekonomi lokal, bukan sebagai satu-satunya ukuran kekuatan ekonomi wilayah.

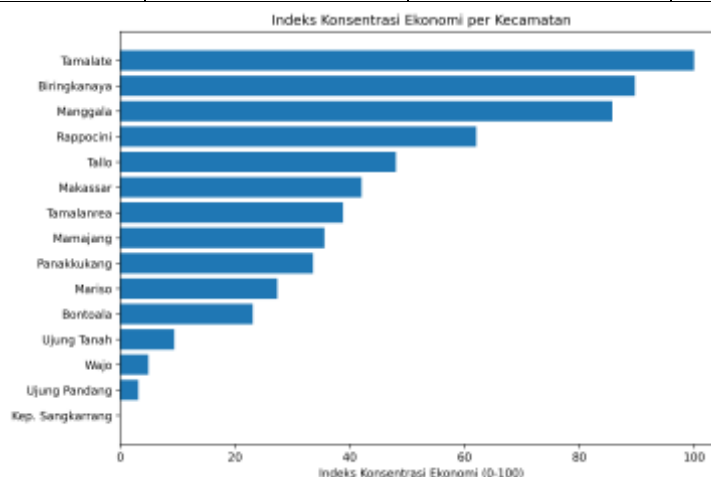
Indeks Konsentrasi Ekonomi

Indeks Konsentrasi Ekonomi (IKE) digunakan untuk menstandarkan jumlah UMKM antar kecamatan agar dapat dibandingkan dalam skala yang sama. IKE dihitung menggunakan metode normalisasi min-max, dengan nilai 0 menunjukkan kecamatan dengan jumlah UMKM terendah dan nilai 100 menunjukkan kecamatan dengan jumlah UMKM tertinggi. Kategori IKE dibagi menggunakan pendekatan interval sama, yaitu rendah, sedang, dan tinggi.

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa Tamalate memperoleh nilai IKE tertinggi sebesar 100,00, diikuti Biringkanaya sebesar 89,70 dan Manggala sebesar 85,76. Ketiga kecamatan ini berada dalam kategori konsentrasi tinggi. Rappocini, Tallo, Makassar, Tamalanrea, Mamajang, dan Panakkukang berada pada kategori sedang. Sementara itu, Mariso, Bontoala, Ujung Tanah, Wajo, Ujung Pandang, dan Kepulauan Sangkarrang berada pada kategori rendah.

Tabel 5 Indeks Konsentrasi Ekonomi per Kecamatan

Kecamatan	Jumlah UMKM	IKE	Kategori
Tamalate	4.533	100	Tinggi
Biringkanaya	4.120	89,7	Tinggi
Manggala	3.962	85,76	Tinggi
Rappocini	3.012	62,08	Sedang
Tallo	2.450	48,07	Sedang
Makassar	2.210	42,08	Sedang
Tamalanrea	2.080	38,84	Sedang
Mamajang	1.950	35,6	Sedang
Panakkukang	1.870	33,61	Sedang
Mariso	1.620	27,37	Rendah
Bontoala	1.450	23,14	Rendah
Ujung Tanah	900	9,42	Rendah
Wajo	720	4,94	Rendah
Ujung Pandang	650	3,19	Rendah
Kep. Sangkarrang	522	0	Rendah



Gambar 3 Indeks Konsentrasi Ekonomi per Kecamatan

Temuan penting dari IKE adalah adanya jarak yang cukup besar antara kecamatan dengan konsentrasi UMKM tertinggi dan terendah. Namun, nilai IKE rendah tidak otomatis berarti suatu wilayah tidak memiliki peran ekonomi. Kecamatan seperti Ujung Pandang dan Wajo, misalnya, dapat memiliki aktivitas jasa, perdagangan formal, pemerintahan, atau fungsi kota lainnya yang tidak sepenuhnya tertangkap oleh indikator jumlah UMKM. Karena itu, IKE harus dibaca sebagai ukuran konsentrasi UMKM, bukan ukuran tunggal aktivitas ekonomi wilayah.

4.3 Pembacaan Indikator Pendukung Wilayah

Setelah IKE diperoleh, hasil tersebut dibandingkan dengan indikator pendukung, yaitu aksesibilitas wilayah, fasilitas publik, tekanan demografis, dan kesesuaian tata ruang. Perbandingan ini penting karena kecamatan dengan konsentrasi UMKM tinggi belum tentu dapat disebut sebagai pusat pertumbuhan yang inklusif apabila tidak didukung oleh akses transportasi, layanan publik, dan arahan tata ruang yang memadai.

Secara umum, kecamatan dengan konsentrasi UMKM tinggi menunjukkan karakter yang berbeda-beda. Tamalate dan Biringkanaya memiliki jumlah UMKM tinggi dan didukung oleh perkembangan permukiman serta aktivitas ekonomi lokal yang kuat. Namun, tingginya jumlah UMKM juga menunjukkan perlunya penguatan infrastruktur, layanan publik, dan pengendalian tekanan wilayah. Manggala juga memiliki IKE tinggi, tetapi perlu dibaca lebih hati-hati karena perkembangan ekonominya perlu dibandingkan dengan dukungan aksesibilitas dan fasilitas publik yang tersedia. Dengan kata lain, Manggala tidak cukup hanya disebut sebagai pusat ekonomi kuat, tetapi lebih tepat dibaca sebagai wilayah yang tumbuh cepat dan membutuhkan penguatan akses serta layanan.

Rappocini, Makassar, Tamalanrea, Mamajang, dan Panakkukang menunjukkan posisi yang lebih seimbang. Meskipun tidak seluruhnya memiliki IKE tinggi, kecamatan-kecamatan ini memiliki aksesibilitas dan fungsi perkotaan yang relatif kuat. Oleh karena itu, wilayah tersebut dapat dibaca sebagai sub-pusat potensial yang dapat mendukung distribusi aktivitas ekonomi secara lebih merata.

Sebaliknya, Kepulauan Sangkarrang menunjukkan karakter yang berbeda karena memiliki jumlah UMKM paling rendah dan menghadapi keterbatasan geografis. Kondisi ini menunjukkan perlunya pendekatan kebijakan yang berbeda, terutama dalam bentuk penguatan konektivitas, layanan dasar, jaringan digital, dan pemberdayaan ekonomi lokal.

Kesesuaian dengan Arahan Tata Ruang

Hasil pembacaan terhadap arahan RTRW/RDTR menunjukkan bahwa konsentrasi UMKM perlu dikaitkan dengan struktur ruang kota, terutama pusat kegiatan, kawasan perdagangan-jasa, jaringan jalan utama, dan kawasan pengembangan. Kecamatan dengan IKE tinggi yang berada pada kawasan yang memang diarahkan sebagai pusat kegiatan atau koridor ekonomi dapat dibaca sebagai wilayah yang relatif selaras dengan arah tata ruang.

Namun, apabila suatu kecamatan memiliki konsentrasi UMKM tinggi tetapi belum didukung akses transportasi, fasilitas publik, atau kesesuaian ruang yang memadai, maka wilayah tersebut memerlukan intervensi tata ruang. Intervensi tersebut dapat berupa peningkatan konektivitas, penguatan fasilitas publik, penataan kawasan usaha, dan pengendalian pemanfaatan ruang agar pertumbuhan UMKM tidak menciptakan tekanan baru.

Temuan ini menunjukkan bahwa tata ruang tidak cukup hanya mengikuti pola pertumbuhan UMKM yang sudah terjadi. Tata ruang juga perlu mengarahkan pembentukan sub-pusat ekonomi baru agar aktivitas ekonomi tidak terlalu terkonsentrasi pada beberapa kecamatan tertentu.

Tipologi Wilayah Berdasarkan Konsentrasi UMKM dan Indikator Pendukung

Berdasarkan kombinasi antara IKE, aksesibilitas wilayah, fasilitas publik, tekanan demografis, dan kesesuaian tata ruang, kecamatan di Kota Makassar dapat dikelompokkan ke dalam beberapa tipologi wilayah. Tipologi ini bersifat deskriptif-analitis dan digunakan untuk membaca posisi setiap kecamatan dalam perencanaan tata ruang yang lebih inklusif.

Tabel 6 Tipologi Wilayah Berdasarkan Konsentrasi UMKM dan Indikator Pendukung

Tipologi	Kecamatan	Makna Temuan
Pusat ekonomi kuat	Tamalate, Biringkanaya	Memiliki konsentrasi UMKM tinggi dan menjadi pusat aktivitas ekonomi lokal yang perlu diperkuat dengan layanan dan konektivitas
Wilayah tumbuh tidak seimbang	Manggala, Tallo	Memiliki aktivitas UMKM relatif kuat, tetapi masih membutuhkan penguatan aksesibilitas, fasilitas publik, dan pengendalian tekanan wilayah
Sub-pusat potensial	Rappocini, Makassar, Tamalanrea, Mamajang, Panakkukang, Mariso, Wajo, Ujung Pandang	Memiliki potensi sebagai pendukung distribusi aktivitas ekonomi karena akses, fungsi kota, atau posisi strategisnya
Wilayah tertinggal akses	Kepulauan Sangkarrang, Ujung Tanah	Membutuhkan penguatan konektivitas, layanan dasar, dan pemberdayaan ekonomi lokal
Wilayah konflik tata ruang	Tidak teridentifikasi secara kuat berdasarkan data yang tersedia	Membutuhkan data lebih rinci pada tingkat kelurahan atau zonasi RDTR untuk memastikan konflik pemanfaatan ruang

Berdasarkan tipologi tersebut, Tamalate dan Biringkanaya dapat dibaca sebagai pusat ekonomi kuat karena memiliki konsentrasi UMKM yang tinggi dan peran penting dalam aktivitas ekonomi lokal. Namun, status sebagai pusat ekonomi kuat tidak berarti wilayah tersebut telah sepenuhnya inklusif. Kedua wilayah tetap membutuhkan penguatan konektivitas, layanan publik, dan pengendalian kepadatan agar pertumbuhan UMKM tidak menimbulkan tekanan baru.

Manggala dan Tallo lebih tepat dibaca sebagai wilayah tumbuh tidak seimbang. Keduanya menunjukkan aktivitas UMKM yang cukup kuat, tetapi membutuhkan dukungan aksesibilitas, fasilitas publik, dan penataan ruang yang lebih baik. Jika tidak diperkuat, pertumbuhan ekonomi di wilayah ini dapat menciptakan tekanan terhadap layanan dasar dan kualitas ruang.

Rappocini, Makassar, Tamalanrea, Mamajang, Panakkukang, Mariso, Wajo, dan Ujung Pandang dapat ditempatkan sebagai sub-pusat potensial. Meskipun sebagian kecamatan memiliki IKE sedang atau rendah, wilayah-wilayah ini memiliki fungsi kota, aksesibilitas, atau posisi strategis yang dapat mendukung penyebaran aktivitas ekonomi. Khusus Ujung Pandang dan Wajo, rendahnya jumlah UMKM perlu dibaca hati-hati karena kawasan tersebut dapat memiliki aktivitas ekonomi formal yang tidak sepenuhnya tercermin dalam data UMKM.

Kepulauan Sangkarrang dan Ujung Tanah termasuk wilayah yang membutuhkan perhatian lebih dari sisi akses dan layanan. Kepulauan Sangkarrang memiliki hambatan geografis yang membuat pengembangan UMKM membutuhkan strategi berbeda dibandingkan kecamatan daratan. Sementara itu, Ujung Tanah memerlukan penguatan konektivitas dan layanan wilayah agar tidak tertinggal dari kecamatan lain.

Hasil penelitian menunjukkan tiga temuan utama. Pertama, konsentrasi UMKM di Kota Makassar tidak tersebar merata dan hampir setengah dari total UMKM berada pada empat kecamatan, yaitu Tamalate, Biringkanaya, Manggala, dan Rappocini. Kedua, konsentrasi UMKM tidak selalu mengikuti pola pusat kota lama, tetapi juga menguat pada kecamatan yang mengalami pertumbuhan permukiman dan aktivitas ekonomi baru. Ketiga, jumlah UMKM yang tinggi belum otomatis menunjukkan pusat pertumbuhan yang inklusif. Konsentrasi UMKM perlu dibaca bersama aksesibilitas, fasilitas publik, tekanan demografis, dan kesesuaian tata ruang. Hal ini menegaskan bahwa perencanaan tata ruang di Kota Makassar perlu diarahkan tidak hanya untuk mengakomodasi wilayah yang sudah memiliki konsentrasi UMKM tinggi, tetapi juga untuk memperkuat sub-pusat ekonomi potensial dan meningkatkan akses wilayah yang masih tertinggal. Pendekatan ini penting agar pertumbuhan UMKM tidak hanya terkonsentrasi pada beberapa kecamatan, tetapi dapat mendukung pemerataan akses ekonomi antarwilayah.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsentrasi UMKM di Kota Makassar tidak dapat langsung dipahami sebagai indikator keberhasilan pembangunan ekonomi wilayah. Jumlah UMKM yang tinggi memang menunjukkan adanya aktivitas ekonomi lokal yang kuat, tetapi belum cukup untuk menyimpulkan bahwa wilayah tersebut telah berkembang secara inklusif. Dalam konteks perkotaan, konsentrasi UMKM perlu dibaca bersama dengan aksesibilitas, ketersediaan fasilitas publik, tekanan demografis, serta kesesuaian dengan arahan tata ruang. Lebih lanjut, bahwa pusat ekonomi yang kuat bukan hanya wilayah yang memiliki banyak pelaku usaha, tetapi wilayah yang mampu menghubungkan aktivitas ekonomi tersebut dengan akses pasar, mobilitas penduduk, layanan dasar, dan peluang ekonomi yang lebih luas.

Pola konsentrasi UMKM di Kota Makassar dapat dijelaskan melalui beberapa faktor spasial. Pertama, kecamatan dengan jumlah UMKM tinggi umumnya memiliki basis permukiman yang besar dan pasar lokal yang luas. Wilayah seperti Tamalate, Biringkanaya, Manggala, dan Rappocini tidak hanya berkembang sebagai ruang hunian, tetapi juga sebagai ruang aktivitas ekonomi sehari-hari. Pertumbuhan penduduk dan perkembangan kawasan permukiman mendorong munculnya usaha mikro dan kecil yang melayani kebutuhan konsumsi lokal, seperti perdagangan, makanan, jasa rumah tangga, dan usaha berbasis lingkungan permukiman. Artinya, konsentrasi UMKM tidak semata-mata muncul karena posisi wilayah sebagai pusat kota, tetapi juga karena besarnya permintaan lokal yang terbentuk dari pertumbuhan permukiman.

Kedua, aksesibilitas menjadi faktor penting yang memengaruhi penyebaran UMKM. Kecamatan yang terhubung dengan jaringan jalan utama, koridor perdagangan, kawasan pendidikan, perkantoran, dan simpul transportasi cenderung lebih mudah menarik aktivitas usaha. Kondisi ini sejalan dengan teori aglomerasi yang menjelaskan bahwa aktivitas ekonomi berkumpul pada lokasi yang memiliki keuntungan kedekatan, akses pasar, serta efisiensi mobilitas. Marshall (1890) dan Krugman (1991) membantu menjelaskan mengapa wilayah dengan akses dan pasar yang lebih kuat cenderung menarik lebih banyak aktivitas ekonomi. Namun, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa aglomerasi tidak cukup dipahami sebagai proses ekonomi alami. Aglomerasi perlu diarahkan melalui tata ruang agar tidak hanya memperkuat wilayah yang sudah berkembang.

Ketiga, pola konsentrasi UMKM juga dipengaruhi oleh perbedaan fungsi ruang antar kecamatan. Kecamatan pusat kota lama seperti Ujung Pandang dan Wajo memiliki jumlah UMKM yang relatif rendah dalam data ini, tetapi hal tersebut tidak otomatis berarti aktivitas ekonominya lemah. Wilayah tersebut dapat memiliki fungsi ekonomi formal yang lebih dominan, seperti perdagangan besar, perhotelan, jasa profesional, pemerintahan, perkantoran, atau aktivitas ekonomi bernilai tinggi yang tidak seluruhnya tercatat sebagai UMKM. Ini menunjukkan bahwa jumlah UMKM memiliki keterbatasan sebagai indikator tunggal aktivitas ekonomi. Jika penelitian hanya menggunakan jumlah UMKM, maka wilayah dengan usaha formal berskala lebih besar dapat terlihat “rendah”, padahal secara ekonomi tetap strategis.

Keempat, wilayah dengan hambatan geografis seperti Kepulauan Sangkarrang membutuhkan pembacaan berbeda. Rendahnya jumlah UMKM pada wilayah kepulauan tidak dapat disamakan begitu saja dengan rendahnya potensi ekonomi. Hambatan konektivitas, keterbatasan transportasi, biaya distribusi, akses pasar, dan ketersediaan layanan dasar dapat membatasi perkembangan UMKM. Oleh karena itu, pendekatan tata ruang untuk wilayah kepulauan tidak cukup hanya dengan mendorong pertumbuhan unit usaha, tetapi harus didukung oleh peningkatan konektivitas, layanan publik, jaringan digital, dan penguatan ekonomi lokal berbasis karakter wilayah.

Temuan ini memperlihatkan bahwa konsentrasi UMKM di Makassar tidak mengikuti pola pusat-pinggiran secara sederhana. Beberapa wilayah yang bukan pusat kota lama justru memiliki konsentrasi UMKM tinggi karena didorong oleh pertumbuhan permukiman dan pasar lokal. Sebaliknya, beberapa wilayah pusat kota memiliki jumlah UMKM lebih rendah karena fungsi ekonominya lebih formal atau lebih terspesialisasi. Dengan demikian, pola spasial UMKM di Makassar lebih tepat dipahami sebagai hasil interaksi antara pertumbuhan permukiman, aksesibilitas, fungsi ruang, pasar lokal, dan arahan tata ruang.

Pada perspektif teori pusat pertumbuhan, kecamatan dengan konsentrasi UMKM tinggi dapat menjadi pusat pertumbuhan lokal apabila mampu menciptakan efek sebaran bagi wilayah

sekitarnya. Myrdal (1957) menjelaskan bahwa pusat pertumbuhan dapat menghasilkan *spread effect* maupun *backwash effect*. Dalam kaitannya dengan kota Makassar, konsentrasi UMKM akan memberikan *spread effect* apabila mampu membuka akses usaha, memperluas pasar lokal, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat konektivitas antarwilayah. Namun, konsentrasi tersebut dapat berubah menjadi *backwash effect* apabila hanya menarik investasi, layanan, dan infrastruktur ke wilayah tertentu, sementara wilayah lain tetap tertinggal dalam akses ekonomi dan layanan dasar.

Penelitian ini menegaskan pentingnya struktur pertumbuhan yang lebih polisentris. Kota Makassar tidak seharusnya bergantung pada satu atau dua pusat aktivitas ekonomi, tetapi perlu mengembangkan beberapa sub-pusat ekonomi yang terhubung. Sub-pusat ekonomi tidak boleh hanya dipahami sebagai kawasan komersial baru, tetapi harus dirancang sebagai simpul kegiatan yang mengintegrasikan ruang usaha UMKM, transportasi, layanan publik, permukiman, dan akses pasar. Sehingga dengan cara ini, pertumbuhan UMKM dapat menjadi instrumen pemerataan ekonomi lokal, bukan sekadar pemusatan aktivitas usaha pada wilayah yang sudah padat.

Dari perspektif tata ruang inklusif, temuan penelitian menunjukkan bahwa RTRW/RDTR perlu digunakan bukan hanya sebagai instrumen pengaturan zonasi, tetapi sebagai alat untuk mengarahkan distribusi manfaat pembangunan. Tata ruang yang inklusif harus mampu mengidentifikasi wilayah mana yang telah menjadi pusat ekonomi kuat, wilayah mana yang berpotensi dikembangkan sebagai sub-pusat, dan wilayah mana yang membutuhkan intervensi akses serta layanan dasar. Harvey (2008), Soja (2010), dan UN-Habitat (2020) menekankan bahwa pembangunan kota tidak cukup dinilai dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan kota mendistribusikan akses terhadap ruang, layanan, transportasi, dan kesempatan ekonomi.

Namun, penelitian ini juga memiliki keterbatasan penting. Penggunaan jumlah UMKM sebagai indikator utama konsentrasi ekonomi hanya mampu menangkap aspek kuantitas unit usaha, bukan kualitas aktivitas ekonomi. Data jumlah UMKM tidak menjelaskan skala usaha, omzet, tenaga kerja, produktivitas, jenis sektor, keberlanjutan usaha, maupun kontribusi ekonomi riil tiap kecamatan. Akibatnya, kecamatan dengan banyak usaha mikro dapat terlihat lebih dominan dibandingkan kecamatan dengan jumlah usaha lebih sedikit tetapi memiliki nilai ekonomi lebih besar. Karena itu, hasil penelitian ini harus dipahami sebagai pemetaan awal konsentrasi UMKM, bukan sebagai ukuran final kekuatan ekonomi wilayah. Keterbatasan lain terletak pada penggunaan unit analisis kecamatan. Skala kecamatan berguna untuk membaca pola umum, tetapi belum cukup rinci untuk menangkap variasi spasial di tingkat kelurahan, koridor jalan, pasar, atau kawasan perdagangan tertentu. Dalam kenyataan perkotaan, konsentrasi UMKM sering kali muncul pada titik-titik yang lebih mikro, seperti sekitar pasar, kampus, kawasan kuliner, terminal, permukiman padat, atau koridor jalan utama. Oleh karena itu, penelitian lanjutan perlu menggunakan data yang lebih rinci pada tingkat kelurahan atau titik koordinat usaha agar pola spasial UMKM dapat dibaca lebih presisi.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa distribusi UMKM di Kota Makassar belum tersebar secara merata antar kecamatan. Konsentrasi UMKM terutama terlihat pada Tamalate, Biringkanaya, Manggala, dan Rappocini. Temuan ini mengindikasikan bahwa aktivitas UMKM tidak hanya terkonsentrasi pada pusat kota lama, tetapi juga menguat pada kecamatan dengan pertumbuhan permukiman, pasar lokal, dan aktivitas ekonomi baru. Konsentrasi UMKM tidak dapat langsung disimpulkan sebagai bukti keberhasilan pembangunan wilayah. Jumlah UMKM yang tinggi hanya menunjukkan adanya pemusatan unit usaha, bukan secara otomatis mencerminkan pemerataan akses ekonomi atau terbentuknya pusat pertumbuhan yang inklusif. Konsentrasi tersebut perlu dibaca bersama dengan aksesibilitas wilayah, ketersediaan fasilitas publik, tekanan demografis, dan kesesuaian dengan arahan tata ruang.

Penelitian ini menegaskan bahwa konsentrasi UMKM dapat menjadi dasar awal untuk mengidentifikasi pusat ekonomi eksisting dan sub-pusat potensial di Kota Makassar. Akan tetapi, karena penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dan data sekunder tingkat kecamatan, temuan yang dihasilkan lebih tepat dipahami sebagai **indikasi awal pola konsentrasi UMKM**

dan potensi ketimpangan akses wilayah, bukan sebagai pembuktian kausal mengenai ketimpangan spasial perkotaan. Secara konseptual, ini menunjukkan bahwa teori aglomerasi dan teori pusat pertumbuhan perlu dibaca bersama dengan perspektif kota inklusif dan keadilan spasial. Aglomerasi menjelaskan mengapa UMKM cenderung terkonsentrasi pada wilayah tertentu, sedangkan konsep kota inklusif membantu menilai apakah konsentrasi tersebut berpotensi memperluas akses ekonomi atau justru memperkuat tekanan wilayah.

Hasil penelitian ini memberikan beberapa implikasi bagi perencanaan tata ruang di Kota Makassar. Pertama, pemerintah kota perlu memperkuat basis data spasial UMKM, tidak hanya berdasarkan jumlah unit usaha, tetapi juga sektor usaha, omzet, tenaga kerja, lokasi usaha, status legalitas, dan keterhubungan dengan pasar. Data yang lebih rinci akan membantu pemerintah menentukan wilayah mana yang berfungsi sebagai pusat ekonomi, sub-pusat potensial, dan wilayah yang membutuhkan intervensi. Kedua, pengembangan transportasi dan konektivitas tidak seharusnya hanya diarahkan ke pusat kota lama, tetapi juga perlu menghubungkan kecamatan-kecamatan dengan konsentrasi UMKM tinggi dan sub-pusat ekonomi potensial. Dengan demikian, manfaat pertumbuhan UMKM dapat tersebar lebih luas antarwilayah. Ketiga, kecamatan dengan pertumbuhan UMKM cepat perlu diimbangi dengan penyediaan fasilitas publik, infrastruktur dasar, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Tanpa dukungan tersebut, konsentrasi UMKM berpotensi menimbulkan tekanan baru, seperti kepadatan aktivitas, kemacetan lokal, peningkatan kebutuhan layanan dasar, dan persaingan ruang usaha. Keempat, wilayah dengan akses terbatas perlu memperoleh perhatian khusus melalui peningkatan konektivitas, layanan dasar, jaringan digital, dan pemberdayaan ekonomi lokal. Intervensi ini penting agar wilayah dengan keterbatasan geografis atau akses tidak semakin tertinggal dari kecamatan yang sudah memiliki basis ekonomi lebih kuat.

Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan data UMKM yang lebih rinci, baik dari sisi lokasi maupun karakteristik usaha, seperti koordinat usaha, sektor usaha, omzet, tenaga kerja, status legalitas, lama usaha, serta keterhubungan dengan pasar digital maupun pasar fisik. Selain itu, penelitian berikutnya perlu menggunakan unit analisis yang lebih kecil, seperti kelurahan atau titik lokasi usaha, agar pola konsentrasi UMKM dapat dibaca lebih presisi. Analisis berbasis GIS/QGIS juga perlu diperkuat melalui peta tematik, overlay dengan RTRW/RDTR, analisis kedekatan terhadap jalan utama, analisis jangkauan fasilitas publik, serta perbandingan antara pusat kegiatan aktual dan pusat kegiatan yang direncanakan. Penelitian lanjutan juga dapat membangun indeks empiris yang lebih kuat dengan indikator yang dapat diverifikasi, seperti jumlah UMKM per 1.000 penduduk, jumlah fasilitas kesehatan per 10.000 penduduk, jarak rata-rata ke jalan utama, jarak ke pusat perdagangan, kepadatan jaringan jalan, serta kesesuaian lokasi usaha dengan zonasi RTRW/RDTR. Dengan demikian, penelitian ini sebaiknya diposisikan sebagai studi awal yang memetakan konsentrasi spasial UMKM di Kota Makassar dan meninjau relevansinya bagi perencanaan tata ruang inklusif, dengan kontribusi utama pada penyediaan dasar awal untuk membaca hubungan antara distribusi UMKM, akses wilayah, dan kebutuhan penguatan sub-pusat ekonomi lokal, bukan sebagai pembuktian final mengenai ketimpangan spasial.

DAFTAR PUSTAKA

- Anselin, L. (1995). Local indicators of spatial association—LISA. *Geographical Analysis*, 27(2), 93–115. <https://doi.org/10.1111/j.1538-4632.1995.tb00338.x>
- Arvin, M., Jalaei, M., Taheri, J., Badakhshan, B., Ghane, M., & Sharifi, A. (2025). Examining the relationship between urban form and social inequality: A neighborhood-level analysis. *Applied Geography*, 176, 103532. <https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2025.103532>
- Barbosa, V., Suárez, M., Cerda, J., & Thoene, U. (2024). Urban structure to determine equitable city growth for spatial justice: A case study of Chia-Bogotá, Colombia. *Journal of Urban Mobility*, 5, 100080. <https://doi.org/10.1016/j.urbmob.2024.100080>
- Fujita, M., Krugman, P., & Venables, A. J. (1999). *The spatial economy: Cities, regions, and international trade*. MIT Press.
- Guillain, R., & Le Gallo, J. (2010). Employment density in Île-de-France: Evidence from local regressions. In A. Páez, J. Gallo, R. N. Buliung, & S. Dall'erba (Eds.), *Progress in spatial analysis: Methods and applications* (pp. 233–251). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-642-03326-1_12
- Harvey, D. (2008). The right to the city. In R. Atkinson & G. Bridge (Eds.), *The new urban sociology reader*. Routledge. <https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9780429261732-35/right->

[city-david-harvey](#)

- Hirschman, A. O. (1958). *The strategy of economic development*. Yale University Press.
- Krugman, P. (1991). *Geography and trade*. MIT Press.
- Lan, J., Chen, M., & Pan, Y. (2026). Fintech agglomeration and urban labor markets: Evidence from Chinese cities. *Habitat International*, 171, 103790. <https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2026.103790>
- Lefebvre, H. (1968). *Le droit à la ville*. Anthropos.
- Liao, L., Cai, X., Liu, L., & Sun, Z. (2025). Exploring heterogeneous paths of social integration of the floating population in the communities in Guangdong, China. *Cities*, 163, 106024. <https://doi.org/10.1016/j.cities.2025.106024>
- Longley, P. A., Goodchild, M. F., Maguire, D. J., & Rhind, D. W. (2015). *Geographic information science and systems*. John Wiley & Sons.
- Malczewski, J. (1999). *GIS and multicriteria decision analysis*. John Wiley & Sons.
- Marshall, A. (1890). *Principles of economics*. Macmillan.
- Myrdal, G. (1957). *Economic theory and underdeveloped regions*. Duckworth.
- OECD, & European Commission Joint Research Centre. (2008). *Handbook on constructing composite indicators: Methodology and user guide*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/9789264043466-en>
- Ouassou, E., & Idrissi, B. I. (2025). Regional inequality in the dark: Tackling unequal development through outer space redistribution and spatial targeting policies in Morocco. *Applied Spatial Analysis and Policy*, 18(4). <https://doi.org/10.1007/s12061-025-09757-0>
- Perroux, F. (1955). Note sur la notion de pôle de croissance. *Économie appliquée*, 8(1–2), 307–320. <https://doi.org/10.3406/ecoap.1955.2522>
- Praja, S. E., & Asran, A. (2025). Strategi tata ruang kota ramah lingkungan: Pendekatan ekologis dalam perencanaan urban Kota Makassar. *Journal of Health Quality Development*, 5(1), 12–22.
- Soja, E. W. (2010). *Seeking spatial justice*. University of Minnesota Press.
- Syahnur, M. H., Rohman, F., Sumiati, S., & Suryadi, N. (2025). Technology Adoption in a Decade. *Journal of Accounting, Business and Management (JABM)*, 32(2), 103–126. <https://doi.org/10.31966/jabminternational.v32i2.1571>
- Syahnur, M. H., & Bahari, A. F. (2023). Determinants of neighborhood references, and environmental stimuli on purchasing decisions for halal products for consumers. *Golden Ratio of Marketing and Applied Psychology of Business*, 3(1), 20–33. <https://doi.org/10.52970/grmapb.v3i1.277>
- Tripathi, S., & Yenneti, K. (2024). Does inequality in urban population distribution lead to income inequality? Evidence from India. *Asia-Pacific Journal of Regional Science*, 8(3), 787–818. <https://doi.org/10.1007/s41685-024-00345-7>
- UN-Habitat. (2020). *World cities report 2020: The value of sustainable urbanization*. United Nations Human Settlements Programme. <https://unhabitat.org/world-cities-report-2020-the-value-of-sustainable-urbanization>
- Wu, J. (2010). Economic fundamentals and urban-suburban disparities. *Journal of Regional Science*, 50(2), 570–591. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9787.2010.00665.x>
- Xu, F., Wang, Z., Chi, G., Wang, D., Zhang, Z., & Zuo, D. (2021). Differentiation and progress of urban regionalization in China: Perspectives of land use and geography. *Applied Geography*, 137, 102600. <https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2021.102600>
- Yang, J., French, S., Holt, J., & Zhang, X. (2012). Measuring the structure of U.S. metropolitan areas, 1970–2000. *Journal of the American Planning Association*, 78(2), 197–209. <https://doi.org/10.1080/01944363.2012.677382>
- Yang, X., Fangqu, N., & Dongqi, S. (2020). Evaluation of urban spatial equality based on accessibility to economic activities: Beijing as a case study. *Complexity*, 2020, Article 4560146. <https://doi.org/10.1155/2020/4560146>
- Yang, Y., & Yan, L. (2025). Spatial distribution patterns of urban economic activities: A graph convolutional network approach. *GeoJournal*, 90(6). <https://doi.org/10.1007/s10708-025-11534-y>
- Yin, C., He, Q., Liu, Y., Chen, W., & Gao, Y. (2018). Inequality of public health and its role in spatial accessibility to medical facilities in China. *Applied Geography*, 92, 50–62. <https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2018.01.011>